



IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA

Muhammad Jodi Prasetyo

¹ Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Kudus
2110910002@student.iainkudus.ac.id.

*Received 1 September 2025; Revised: 3 September 2023; Accepted: 7 September 2023; Published: 30 September 2025; Available
online: September 2023*

ABSTRAK

Al-Mawardi sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam klasik, telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan teori-teori tentang pemerintahan, administrasi negara, dan hubungan antara pemimpin serta rakyat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemikiran politik Al-Mawardi dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan literature, penelitian ini mengeksplorasi relevansi konsep-konsep utama Al-Mawardi, seperti keadilan, legitimasi kekuasaan, dan peran pemimpin, dalam konteks pemerintahan modern Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip Al-Mawardi, terutama terkait dengan kesejahteraan umum dan penegakan hukum, telah diadaptasi dan diterapkan dalam kebijakan publik serta program pembangunan sosial di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tetap relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Al-Mawardi, kebijakan publik, pembangunan sosial, politik Islam

ABSTRACT

Al-Mawardi as one of the important figures in classical Islamic political thought, has made significant contributions in formulating theories about government, state administration, and relationship between leaders and the people. This paper aims to analyze the implementation of Al-Mawardi's political thought in public policy and social development in Indonesia. Through a qualitative method with a literature approach, this research explores the relevance of Al-Mawardi's main concept, such as justice, legitimacy of power, and the role of leader, in the context of modern Indonesia government. The results show that several of Al-Mawardi's principles, especially those related to public welfare and law enforcement, have been adapted and applied in public policies and social development programs in Indonesia. Thus, Al-

Mawardi's thoughts remain relevant and can be a source of inspiration in designing policies oriented towards people's interests and social welfare.

Key Word: Al-Mawardi, public policy, social development, Islamic politics.

PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam klasik memiliki kontribusi besar dalam pembentukan prinsip-prinsip pemerintahan yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Salah satu tokoh sentral dalam khazanah ini adalah Abu al-Hasan Al-Mawardi (972-1058 M), yang melalui karya utamanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, merumuskan dasar-dasar teori kenegaraan, tata kelola pemerintahan, serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Gagasannya mengenai legitimasi kekuasaan, keadilan sosial, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat menjadi warisan penting dalam studi politik Islam dan menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan masyarakat kontemporer. Sebagai ulama, hakim, dan diplomat pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah, Al-Mawardi berhasil memadukan pemahaman mendalam tentang syariah dengan realitas politik zamannya. Magnum opus Al-Mawardi, "*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*" (*Hukum-hukum Pemerintahan*), menjadi karya monumental yang menguraikan secara komprehensif tentang struktur dan fungsi pemerintahan Islam (Abu'l Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-

Basri al-Baghdadi al-Mawardi, 1996). Dalam karyanya, Al-Mawardi mengelaborasi konsep kekhalifahan sebagai institusi politik tertinggi dalam Islam. Ia menegaskan bahwa khalifah adalah wakil Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama dan dunia, sekaligus menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah.

Salah satu gagasan penting Al-Mawardi adalah konsep kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat. Ia berpendapat bahwa kekuasaan pemimpin berasal dari persetujuan rakyat, dan pemimpin memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya (Fadli, 2018). Gagasan ini mendahului pemikiran serupa yang muncul di Barat beberapa abad kemudian. Al-Mawardi juga menguraikan struktur pemerintahan yang mencakup berbagai jabatan dan fungsi, seperti wazir (perdana menteri), amir (gubernur), dan qadi (hakim) (Diana, 2017: 169). Pemikirannya tentang pembagian kekuasaan ini menunjukkan pemahaman yang maju tentang kompleksitas pemerintahan dan kebutuhan akan spesialisasi dalam administrasi publik.

Dalam pandangan Al-Mawardi, agama dan negara adalah dua entitas yang saling

melengkapi. Ia berpendapat bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, namun juga harus mempertimbangkan realitas politik dan sosial. Pemikiran ini mencerminkan keseimbangan antara idealisme Islam dan pragmatisme politik. Al-Mawardi juga membahas konsep legitimasi kekuasaan dalam Islam. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki legitimasi ganda, yaitu dari Allah (melalui kepatuhan pada syariah) dan dari rakyat (melalui baiat atau sumpah setia). Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas ilahiah dan dukungan rakyat dalam pemerintahan Islam. (Rambe, 2020: 23)

Pemikiran Al-Mawardi tentang administrasi publik, pengelolaan keuangan negara, perpajakan, dan pelayanan publik menunjukkan perhatiannya pada aspek-aspek praktis pemerintahan. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, gagasan yang tetap relevan hingga saat ini. Kontribusi Al-Mawardi dalam pemikiran politik Islam memiliki pengaruh yang luas dan bertahan lama. Karyanya menjadi dasar bagi banyak pemikir Muslim selanjutnya dalam mengembangkan teori politik dan tata kelola pemerintahan. Bahkan di era modern, gagasan-gagasannya masih sering dirujuk dalam diskusi tentang sistem pemerintahan Islam dan

hubungan antara agama dan negara.

Dalam konteks sejarah pemikiran politik global, kontribusi Al-Mawardi patut diperhitungkan. Ia mengembangkan konsep-konsep seperti kontrak sosial dan pembagian kekuasaan jauh sebelum pemikir-pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, atau Montesquieu. (Rahmawati, 2018: 273) Ini menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam memiliki peran penting dalam perkembangan teori politik modern. Pemikiran Al-Mawardi terus menjadi subjek kajian dan interpretasi dalam upaya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam konteks negara-bangsa modern dan demokrasi. Kedalaman dan keluasan pemikirannya membuat Al-Mawardi tetap relevan sebagai rujukan dalam studi politik Islam dan teori pemerintahan hingga saat ini.

Teori-teori yang mendasari penelitian ini berakar pada pemikiran Al-Mawardi tentang hubungan antara agama dan negara, dengan fokus utama pada prinsip-prinsip keadilan, legitimasi kekuasaan, kepemimpinan sebagai pelayanan, hubungan agama dan negara, serta pembangunan sosial berkelanjutan. Pertama, teori keadilan menegaskan bahwa

keadilan adalah landasan utama dalam pemerintahan. Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk memastikan distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik yang merata. Kedua, teori legitimasi kekuasaan Al-Mawardi didasarkan pada otoritas ilahi melalui kepatuhan kepada syariah dan dukungan rakyat melalui persetujuan kolektif, yang bersama-sama memberikan dasar bagi kekuasaan yang sah (Diana et al., 2021).

Teori kepemimpinan sebagai pelayanan menyoroti peran pemimpin sebagai pelayan masyarakat, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan pengelolaan pemerintahan secara transparan dan adil. Dalam pandangan Al-Mawardi, kepemimpinan bukan sekadar memegang kekuasaan, tetapi menjalankan amanah untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Teori hubungan agama dan negara dalam pemikiran Al-Mawardi memandang bahwa keduanya saling melengkapi, di mana agama menyediakan nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan negara mengimplementasikan aturan dan kebijakan berdasarkan nilai tersebut. Terakhir, teori pembangunan sosial berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial. Al-Mawardi menekankan perlunya

pembangunan ekonomi yang adil, infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kapasitas manusia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing (Widyatma, 2014).

Kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia terus mengalami dinamika, baik dalam tataran konseptual maupun implementatif. Pemerintah Indonesia dalam berbagai era telah mengusung berbagai pendekatan pembangunan berbasis partisipasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penelaahan terhadap integrasi nilai-nilai politik Islam klasik khususnya pemikiran Al-Mawardi ke dalam kebijakan publik masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung lebih berfokus pada aspek teologis atau historis pemikiran Al-Mawardi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik kebijakan kontemporer di Indonesia. Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip politik Al-Mawardi dapat diimplementasikan atau direfleksikan dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi pemikiran politik Al-Mawardi dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menjembatani diskursus antara warisan pemikiran politik

Islam klasik dan praktik kenegaraan modern, khususnya dalam konteks Indonesia, dengan harapan dapat memperkaya pendekatan nilai dalam formulasi kebijakan dan memperkuat basis etika dalam pembangunan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature untuk menggali dan menganalisis implementasi pemikiran politik Al-Mawardi dalam kebijakan public dan pembangunan sosial di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya Al-Mawardi, dan teks-teks lain yang relevan dengan pemikirannya. Sementara itu, literature sekunder mencakup penelitian-penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang penerapan pemikiran politik Islam di Indonesia.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep utama dalam pemikiran Al-Mawardi seperti keadilan, legitimasi kekuasaan, dan peran pemimpin, serta konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks kebijakan public dan pembangunan sosial di Indonesia. Hasil akhir dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang

lebih mendalam tentang relevansi pemikiran politik Al-Mawardi bagi kebijakan public dan pembangunan sosial di Indonesia masa kini.

PEMBAHASAN

Pemikiran politik Al-Mawardi yang terletak pada inti hubungan antara agama dan politik memilikir relevansi signifikan dalam kebijakan public dan pembangunan sosial di Indonesia. Al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* dan *Adabud Dunya wa Din*, memberikan kerangka dasar tentang bagaimana negara harus dijalankan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil, dengan menekankan pentingnya integrasi antara agama, keadilan, dan kepemimpinan yang kuat.

Keadilan dalam Kebijakan Publik

Salah satu konsep utama yang digagas oleh Al-Mawardi dalam pemikiran politiknya adalah signifikansi keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan merupakan pilar utama yang menjadi kunci stabilitas politik dan harmonisasi sosial dalam sebuah negara. Ia menggarisbawahi bahwa tanpa keadilan, sebuah pemerintahan akan kehilangan legitimasinya dan berpotensi menciptakan kekacauan sosial. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya menjadi kewajiban moral

bagi pemimpin, tetapi juga menjadi prasyarat bagi pemerintahan yang efektif dan stabil (Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, 2022: 122-123)

Di Indonesia, manifestasi pemikiran Al-Mawardi tentang keadilan tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan. Program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan distributive yang diajukan Al-Mawardi. Program-program ini tidak hanya dirancang sebagai bentuk bantuan semata, tetapi lebih jauh merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya ekonomi negara. (Rusyana & Witro, 2021) Lebih lanjut, prinsip yang digagas Al-Mawardi juga termanifestasi dalam upaya sistematis pemerintah untuk mengurangi ketimpangan regional melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Indonesia merupakan bentuk konkret dari upaya pemerataan akses terhadap layanan publik yang berkualitas (Muhammad Fakhrrur Rodzi, 2023: 155). Hal ini mencerminkan keadilan distributif yang tidak

hanya berorientasi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada pembangunan komunitas yang lebih luas.

Konsep Al-Mawardi tentang keadilan memiliki dimensi yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek distribusi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik yang fundamental. Implementasi system demokrasi di Indonesia, yang memberikan ruang partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara, sejalan dengan prinsip keadilan politik yang diusung Al-Mawardi (Sahrin & Adnir, 2024). Dalam ranah pelayanan publik, konsep keadilan Al-Mawardi terefleksi dalam kebijakan-kebijakan yang menjamin akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Di bidang ekonomi implementasi prinsip keadilan Al-Mawardi juga terlihat dalam kebijakan pengembangan UMKM dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat dan pemberdayaan koperasi mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan ekonomi melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Dukungan ini menciptakan peluang yang lebih setara bagi kelompok ekonomi lemah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sejalan dengan gagasan Al-Mawardi bahwa keadilan harus mencakup aspek distribusi peluang ekonomi (Rusyana & Witro, 2021).

Keadilan dalam tata kelola pemerintahan juga diterapkan melalui reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keadilan dalam pelayanan publik, seperti proses digitalisasi layanan pemerintah, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses hak-haknya. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan penerapan pemikiran Al-Mawardi, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, yang menjadi kunci keberlanjutan legitimasi kekuasaan (Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, 2022).

Legitimasi Kekuasaan dan Keterbukaan Pemerintah

Al-Mawardi menekankan bahwa legitimasi kekuasaan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh posisi formal seorang pemimpin, tetapi juga bagaimana pemimpin tersebut bertindak dalam memenuhi kewajibannya terhadap rakyat. Menurutnya kekuasaan hanya sah jika didasarkan pada kepatuhan syariah serta dukungan rakyat yang didapat melalui baiat atau

persetujuan kolektif. Di Indonesia, legitimasi pemerintah sering diuji melalui proses demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas (Fajri, 2023: 124). Transparansi ini membantu memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyatnya, sejalan dengan prinsip Al-Mawardi bahwa kekuasaan harus didasarkan pada kepercayaan publik dan pengelolaan yang adil.

Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia mencerminkan penerapan konsep pemikiran Al-Mawardi tentang legitimasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen nyata dalam membrantas praktik korupsi melalui berbagai kebijakan dan program strategis, seperti penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi anggaran, dan digitalisasi layanan publik. Upaya sistematis ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi tentang pentingnya integritas dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan negara dan juga untuk membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi

pad kesejahteraan rakyat (Alfuniam & Syamsuddin, 2011). Langkah-langkah reformasi tersebut juga diperkuat dengan pembentukan berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum yang independen, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja birokrasi, yang kesemuanya mencerminkan upaya serius pemerintah dalam membangun system pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Basya, 2021).

Peran Pemimpin Sebagai Pelayan Masyarakat

Menurut pemikiran Al-Mawardi, kedudukan seorang pemimpin memiliki dimensi yang sangat fundamental sebagai pelayan masyarakat, bukan sekedar pemegang kekuasaan tertinggi. Konsepsi ini tercermin secara nyata dalam berbagai implementasi kebijakan publik di Indonesia, yang diwujudkan melalui program-program pemerintah yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat diamati melalui inisiatif strategis seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengintegrasikan berbagai layanan perizinan untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program-program tersebut

merupakan manifestasi konkret dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah sebagai pelayan public yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Lebih jauh lagi, relevansi pemikiran Al-Mawardi dalam konteks kepemimpinan di Indonesia semakin menguat, mengingat ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin politik tidak hanya terbatas pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan material semata, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang komprehensif (Rahmawati, 2018: 271). Dalam perspektif Islam yang sejalan dengan pemikirn Al-Mawardi, seorang pemimpin dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan transparansi (Harahap et al., 2023: 254-255). Nilai-nilai fundamental ini menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sekaligus menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas kepemimpinan yang mampu menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi nilai-nilai kepemimpinan ini juga tercermin dalam berbagai kebijakan reformasi birokrasi, penguatan system pengawasan, dan peningkatan partisipasi public dalam pengambilan keputusan. Semua ini menunjukkan bahwa konsep pelayanan publik dalam

kepemimpinan yang digagas Al-Mawardi tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun system pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang luhur.

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Umum

Al-Mawardi dalam pemikirannya menekankan bahwa pembangunan sosial merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Paradigm ini memiliki resonansi yang kuat dengan arah kebijakan pembangunan sosial di Indonesia, dimana negara secara sistematis dan berkelanjutan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Program Indonesia Pintar sebagai salah satu manifestasi konkret kebijakan ini, tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan dan pengembangan potensi generasi muda secara holistic. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan

mengurangi disparatis pembangunan antar daerah.

Pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Melalui pembangunan ini, pemerintah berusaha menciptakan pemerataan akses terhadap layanan publik dan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah, memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari pembangunan. Program-program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan stabilitas sosial, yang sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia

Prinsip pembangunan sosial yang digagas Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sebuah negara perlu focus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada penguatan media sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia mengadopsi filosofi ini melalui implementasi

kebijakan pembangunan yang bersifat multidimensional. Program-program pembangunan tidak semata-mata diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek pengembangan kapasitas manusia, penguatan modal sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti program pelatihan vokasi, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan ekonomi kreatif yang bertujuan menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. (Maysaroh, 2019)

Implementasi kebijakan pembangunan sosial ini juga diperkuat dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Pemerintah tidak hanya fokus pada pencapaian target-target pembangunan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kohesi sosial masyarakat (Fedryansyah, 2013). Program-program seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, pengembangan desa wisata, dan penguatan UMKM merupakan bukti nyata bagaimana pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan (Sonda, 2018). Pendekatan ini menunjukkan

bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan budaya dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Reformasi Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pemikiran Al-Mawardi tentang tata kelola pemerintahan yang efektif menyoroti pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pembagian tugas yang jelas dalam struktur pemerintahan. Gagasan ini sangat relevan dalam konteks reformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Al-Mawardi menguraikan bahwa pemerintah yang kuat harus memiliki sistem administratif yang terstruktur dengan baik dan dioperasikan oleh individu yang kompeten serta bertanggung jawab. Dalam karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ia membahas pentingnya spesialisasi dalam tugas-tugas administratif dan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap bagian pemerintahan menjalankan fungsi sesuai mandatnya (Sahidin, 2021).

Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini melalui berbagai langkah strategis. Salah satu aspek pentingnya adalah digitalisasi layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah telah mengembangkan sistem berbasis

daring yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa hambatan birokrasi. Contoh nyata adalah penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang memudahkan perizinan usaha (Pohan & Yafiz, 2023). Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan transparansi dalam pelayanan, yang menjadi esensi akuntabilitas sebagaimana yang diuraikan Al-Mawardi dalam konsep administrasi publiknya.

Selain digitalisasi, reformasi ini juga mencakup pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai prinsip keadilan dan integritas. Peningkatan transparansi anggaran, penguatan pengawasan internal, dan penerapan evaluasi berbasis kinerja adalah bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Hal ini mencerminkan relevansi pemikiran Al-Mawardi, yang menekankan bahwa pemerintah yang adil harus bertanggung jawab kepada rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan juga menjadi bagian penting dari reformasi ini. Dalam pandangan Al-Mawardi, hubungan antara pemerintah dan

rakyat bersifat kontraktual, di mana pemimpin memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sementara rakyat memiliki hak untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai mandatnya. Di Indonesia, partisipasi ini diwujudkan melalui kebijakan keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau kebijakan serta keputusan pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana legitimasi kekuasaan, sebagaimana yang dijelaskan Al-Mawardi, tidak hanya bergantung pada posisi formal seorang pemimpin, tetapi juga pada kepercayaan yang diperoleh dari rakyat (Basya, 2021).

Reformasi sistem juga mencakup perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah. Upaya ini meliputi pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Pemerintah juga menerapkan sistem berbasis meritokrasi dalam proses rekrutmen dan promosi, yang mencerminkan pentingnya memilih individu yang kompeten untuk menjalankan tugas-tugas negara, sebagaimana yang diuraikan Al-Mawardi dalam konsep spesialisasi administrasi publiknya (Diana, 2017).

Dengan mengadopsi elemen-elemen inti dari pemikiran

Al-Mawardi, reformasi sistem pemerintahan di Indonesia bertujuan menciptakan tata kelola yang tidak hanya bersih dan efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan rakyat. Upaya ini menegaskan bahwa pemikiran politik Islam klasik seperti yang dirumuskan oleh Al-Mawardi tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern, khususnya dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Implementasi ini tidak hanya menjadi bukti fleksibilitas konsep-konsep klasik, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diajukan oleh Al-Mawardi mampu memberikan panduan praktis bagi tata kelola pemerintahan kontemporer di Indonesia

PENUTUP

Integrasi nilai agama dengan prinsip keadilan, legitimasi kekuasaan, dan peran pemimpin sebagai pelayan masyarakat merupakan inti dari pemikiran Al-Mawardi yang relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Keadilan, sebagai landasan utama, tercermin dalam program-program seperti *Program Keluarga Harapan (PKH)* dan *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*, yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan akses merata terhadap sumber daya negara. Di bidang legitimasi, demokrasi melalui pemilu langsung dan

kebijakan keterbukaan informasi publik menunjukkan penerapan prinsip bahwa kekuasaan harus didasarkan pada persetujuan rakyat, sesuai dengan gagasan Al-Mawardi.

Peran pemimpin sebagai pelayan masyarakat diwujudkan dalam kebijakan pelayanan publik, seperti *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)* dan digitalisasi layanan administrasi. Selain itu, konsep keseimbangan Al-Mawardi antara pembangunan ekonomi, politik yang adil, dan kesejahteraan sosial tercermin dalam upaya pemerataan pembangunan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses pendidikan melalui program *Kartu Indonesia Pintar (KIP)*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Indonesia berupaya membangun tata kelola yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu'l Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, and translated by A. Y. (1996). *AL-Ahkam as-Sultaniyyah = The Laws of Islamic Governance*. Ta-Ha Publisher.
- Alfuniam, M., & Syamsuddin, M. (2011). *Politik Islam Indonesia dalam Perspektif Filsafat Politik Al-Mawardi*. Universitas Gajah Mada.
- Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, M. Y. (2022). *Konsep Keadilan dalam Islam*

- Menurut Al-Mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 3(2), 120-129. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v3i2.47>
- Basya, M. H. (2021). *Islam dan Negara: Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Jurnal Peradaban Islam*, 13(1), 157-176.
- Diana, R., Rohman, A., & H, H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>
- Fadli, Y. (2018). Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal atas Perspektif Sunni). *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 89-106. <https://doi.org/10.31000/jgc s.v2i1.777>
- Fajri, M. N. (2023). in Indonesia Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123-143.
- Fedryansyah, M. (2013). *Kebijakan Sosial dalam Pembangunan*. 12.
- Harahap, H., Nurmaini, E., & Marpaung, S. F. (2023). Etika Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam. *Journal International Multidisciplinary Reasearch*, 1(2), 246-255.
- Maysaroh, D. (2019). *Pemikiran Politik Al-Mawardi Tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Islam*.
- Muhammad Fakhrrur Rodzi. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151-163. <https://doi.org/10.47431/jm d.v3i2.353>
- Pohan, J. D. B., & Yafiz, M. (2023). Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada DPMPSTP Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 21-30.
- Rahmawati. (2018). Sistem Pemerintahan Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 263-283.
- Rambe, T. (2020). Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, 11(1), 18-29.
- Rusyana, A. Y., & Witro, D. (2021). Economic Thought of Al-Mawardi: Analysis of Educator Salary Position. *Share: Jurnal Ekonomi Dan*

- Keuangan Islam*, 10(1), 124.
<https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9260>
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72.
<https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11112>
- Sahrin, A., & Adnir, F. (2024). Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi. *Journal of Human and Education*, 4(5), 81–87.
- Sonda, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(062).
- Widyatma, Z. Y. (2014). Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi. *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 87–103.